

Kejagung: Kasus (Korupsi) Asabri 2 Bulan Lagi Harus Selesai

JAKARTA (IM) - Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) evaluasi seluruh berkas tersangka, termasuk penyitaa aset terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri. Pasaunya, masa tahanan tersangka tinggal dua bulan lagi.

"Kita evaluasi pemberkasan. Jadi kita update 9 berkas di-update karena waktu tinggal sedikit lagi. Untuk dicek berapa persen lagi penyelesaiannya," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Febri Ardiansyah, Selasa (30/3).

Evaluasi pemberkasan dilakukan untuk melihat perkembangan masing-masing tim dalam penyelesaian pemberkasan, termasuk optimalisasi penyitaan aset. Setelah dilakukan evaluasi tim akan menentukan rencana langkah selanjutnya agar proses dapat dipercepat.

"Berapa aset yang sudah disita kelengkapan administrasi, izin pengadilan, semuanya dicek," jelasnya.

Dia menyebut, percepatan dilakukan karena waktu penahanan para tersangka

dugaan tipikor Asabri tinggal sebentar. Para tersangka hanya tinggal dua bulan menjalani penahan.

"Kita kejar karena ini kan ada penahanan terhadap (tersangka) Asabri. Waktunya tinggal dua bulan lagi harus selesai," jelasnya.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus korupsi Asabri yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp 23 triliun.

Sembilan tersangka itu diantaranya Direktur Utama PT Asabri Mayor Jenderal (Purnawirawan) Adam R. Damiri, Letnan Jenderal (Purnawirawan) Sonny Widjaja, Heru Hidayat, Kepala Divisi Investasi Asabri periode Juli 2012 hingga Januari 2017

Ilham W. Siregar, Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, Kepala Divisi Keuangan dan Investasi periode 2012 hingga Mei 2015 Bachtiar Effendi; Direktur Investasi dan Keuangan periode 2013-2019, Hari Setiono, dan dan Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation, Jimmy Sutopo. ● han

Jaksa Minta Kuasa Hukum Habib Rizieq Giat Belajar, Jangan Merasa Sok Pintar

JAKARTA (IM) - Jaksa penuntut umum (JPU) mengingatkan tim kuasa hukum terdakwa kasus kerumunan Megamendung, Rizieq Shihab, agar lebih giat belajar dan tidak merasa sok pintar.

"Kami penuntut umum ingin berpesan dan mengingatkan kembali kepada penasihat hukum terdakwa agar dalam hal ini dapat belajar lebih giat lagi dan tidak merasa sok pintar dengan mengatakan kami bodoh dan dungu," kata JPU dalam sidang pembacaan tanggapan atas eksepsi Rizieq di PN Jakarta Timur, Selasa (30/3).

Jaksa justru menyebut intelektualitas kuasa hukum Rizieq yang dangkal karena dinilai tidak memahami materi eksepsi dan penerapan asas hukum lex specialis derogat legi generalis.

Hal ini disampaikan JPU menanggapi eksepsi kuasa hukum Rizieq yang menilai dakwaan tidak cermat karena menyatukan penerapan Pasal

216 KUHP dengan Pasal 93 UU Kekejarantinaan Kesehatan dan Pasal 14 UU Penyakit Menular dalam dakwaan Rizieq.

"Penuntut umum tidak mengerti asas dasar dalam hukum pidana yakni lex specialis derogat legi generalis yang berarti peraturan khusus mengenyampingkan peraturan umum," kata JPU.

Di samping itu, JPU juga mengomentari eksepsi kuasa hukum Rizieq yang menyebut penggunaan Pasal 93 UU Kekejarantinaan Kesehatan sebagai bentuk penggunaan pasal imajiner.

Menurut JPU, istilah pasal imajiner yang digunakan oleh kuasa hukum Rizieq tidak ditemukan dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia.

"Justu kami mengangap penasihat hukum telah kehabisan akal untuk mencari di mana letak kekeliruan surat dakwaan jaksa penuntut umum," ujar JPU. ● mei

Polhukam

IDN/ANTARA



RAKER OJK DENGAN KOMISI XI DPR

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua Nurhaida sebelum dimulainya rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/3). Rapat kerja tersebut membahas revisi anggaran OJK tahun 2021.

KPK Telusuri Aliran Uang Suap kepada Gubernur Sulsel Nonaktif Nurdin Abdullah

Selain terima suap dari Agung Sucipto, Nurdin Abdullah diduga terima gratifikasi dari kontraktor lainnya Rp3,4 miliar yang berkaitan dengan proyek di Sulsel.

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telusuri aliran uang suap dari berbagai pihak kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif, Nurdin Abdullah.

Aliran uang suap ke Nurdin disinyalir terkait korupsi pengadaan barang dan jasa, perizinan serta pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021.

Penyidik KPK mendalami hal ini ketika memeriksa saksi pihak swasta yakni Nenden Desi Siti Nurjanah sebagai saksi untuk Nurdin Abdullah dan tersangka lainnya.

"Namun, ada dua pihak swasta yang mengkonfirmasi alasan tidak hadir dalam pemanggilan sebagai saksi. Dua saksi itu dari pihak yakni Eka Novianti dan Siti Mutia.

"KPK mengingatkan kepada pihak-pihak yang telah

Edy Rahmat. Uang suap sebesar Rp2 miliar itu diduga terkait keberlanjutan proyek wisata yang akan dikerjakan oleh Agung Sucipto di Bulukumba.

Selain suap dari Agung Sucipto, KPK menduga Nurdin juga menerima uang atau gratifikasi dari kontraktor lainnya.

Nurdin diduga menerima gratifikasi dari kontraktor lainnya sebesar Rp3,4 miliar yang

berkaitan proyek di Sulsel. Atas perbuatannya, Nurdin dan Edy pihak yang diduga penerima suap serta gratifikasi disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tipikor, Juncto Pasal 55 ayat ke 1 KUHP.

Sedangkan Agung yang diduga sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tipikor, Juncto Pasal 55 ayat ke 1 KUHP. ● han

Kubu AHY Sebut Peserta KLB Demokrat Lintas Partai

JAKARTA (IM) - Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Herzaky Mahendra Putra mengangap kubu Ketua Umum Moeldoko selaku begal politik yang terus menubar informasi bohong dan fitnah.

"Tapi, publik pun sudah tidak mau tertipu oleh narasi bohong dan kosong mereka. Karena omongan Rahmad dan gerombolannya itu tong kosong nyaring bunyinya. Tidak ada bukti, tidak ada fakta, hanya kebohongan," ujar Herzaky, Selasa (30/3).

Herzaky menegaskan, Menkumham Yasonna Laoly dan Menkopolkum Mahfud MD juga sudah berulang kali menyatakan bahwa Partai Demokrat yang sah ada pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Alhamdulillah, para pemilik suara di berbagai tingkatan, pengurus DPP, DPD, DPC, maupun anggota Dewan di tiap tingkatan, dari DPR RI, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota, serta kader-kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia, semuanya kompak dan solid bersama Ketua AHY. Tidak ada yang terpengaruh

oleh intimidasi dan manipulasi kubu Moeldoko," katanya. Lebih lanjut Zaky, sapaan akrabnya, mengangap, Moeldoko itu Ketua abal-abal hasil KLB ilegal. Karena syarat sah untuk mengusulkan KLB, tidak terpenuhi sama sekali. Dia melihat tak ada satupun pemilik suara sah, baik DPD, maupun DPC, yang mengusulkan KLB. "Yang melaksanakan KLB ilegal pun tidak sesuai dengan ketentuan di UU Parpol. Bukan DPP Partai Demokrat yang sah, dan tidak ada surat mandat dari DPP Partai Demokrat yang sah," ungkapnya.

"Lalu, pesertanya pun bukan pemilik suara. Banyak yang hadir sudah lama tidak aktif di Partai Demokrat. Bahkan, tidak sedikit yang berasal dari partai lain. Makanya ada yang menyebut ini KLB ilegal lintas partai," sambung Zaky.

Zaky menyebut para begal politik yang tergabung dalam gerombolan Moeldoko ini, gagal penuhi syarat-syarat untuk buat KLB yang sah. Sehingga, terus menubar kebohongan buat menutupi kegagalan total mereka. Kata dia, satu kebohongan mereka kan perlu ditutupi dengan seribu kebohongan lainnya. ● han

oleh intimidasi dan manipulasi kubu Moeldoko," katanya.

Lebih lanjut Zaky, sapaan akrabnya, mengangap, Moeldoko itu Ketua abal-abal hasil KLB ilegal. Karena syarat sah untuk mengusulkan KLB, tidak terpenuhi sama sekali. Dia melihat tak ada satupun pemilik suara sah, baik DPD, maupun DPC, yang mengusulkan KLB. "Yang melaksanakan KLB ilegal pun tidak sesuai dengan ketentuan di UU Parpol. Bukan DPP Partai Demokrat yang sah, dan tidak ada surat mandat dari DPP Partai Demokrat yang sah," ungkapnya.

"Lalu, pesertanya pun bukan pemilik suara. Banyak yang hadir sudah lama tidak aktif di Partai Demokrat. Bahkan, tidak sedikit yang berasal dari partai lain. Makanya ada yang menyebut ini KLB ilegal lintas partai," sambung Zaky.

Zaky menyebut para begal politik yang tergabung dalam gerombolan Moeldoko ini, gagal penuhi syarat-syarat untuk buat KLB yang sah. Sehingga, terus menubar kebohongan buat menutupi kegagalan total mereka. Kata dia, satu kebohongan mereka kan perlu ditutupi dengan seribu kebohongan lainnya. ● han

Zaky menyebut para begal politik yang tergabung dalam gerombolan Moeldoko ini, gagal penuhi syarat-syarat untuk buat KLB yang sah. Sehingga, terus menubar kebohongan buat menutupi kegagalan total mereka. Kata dia, satu kebohongan mereka kan perlu ditutupi dengan seribu kebohongan lainnya. ● han

KPK Dalam Proses Perjanjian Jual Beli Lahan di Cipuyung

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang saksi terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipuyung, Jakarta Timur Tahun 2019, Senin (29/3).

Salah satu SAKSI yang diperiksa seorang notaris bernama Yurisca Lady Enggraeni. "Yurisca dikonfirmasi antara lain terkait proses perjanjian jual beli antara pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Selasa (30/3).

Selain itu, KPK juga memeriksa Staf Penilai di KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Wahyono Adi dan Rekan bernama Rafli Akbar Rafsanjani.

"Rafli dikonfirmasi antara lain terkait teknis dilakukannya penilaian terhadap tanah yang berlokasi di Munjul, Pondok Rangon, Cipuyung, Jakarta Timur," ucap Ali.

KPK hingga saat ini belum bisa menyampaikan detail kasus tersebut. Sebab, sesuai kebijakan KPK, pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tersangka sudah dilakukan.

Ali menyampaikan, KPK akan memberikan penjelasan kepada publik pada waktunya tentang konstruksi perkara, alat bukti, dan keterlibatan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka beserta pasar sangkaannya. ● han

LAPORAN KEUANGAN PT BATAVIA PROSPERINDO TRANS Tbk



BATAVIA PROSPERINDO TRANS

Kantor Pusat:
Chase Plaza, Lantai 12
Jl. Jend Sudirman Kav 21
Jakarta Selatan 12920
Jakarta, Indonesia
Telepon : (021) 5200434
Fax : (021) 5706413

LAPORAN POSISI KEUANGAN		
Tanggal 31 Desember 2020 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan kas di bank	1.018.547.283	912.096.011
Portofolio efek - pihak berelasi	-	2.450.537.235
Piutang usaha - neto		
Pihak ketiga	18.249.460.108	20.997.415.175
Pihak berelasi	263.575.000	1.019.933.117
Piutang lain-lain	939.185.314	644.645.702
Pendapatan yang belum ditagih	763.082.885	982.015.524
Persediaan	235.477.155	67.153.508
Uang muka	4.163.301.667	1.451.559.800
Beban dibayar di muka	4.274.969.681	3.325.833.768
Pajak Pertambahan Nilai dibayar di muka	3.040.272.837	8.426.358.238
Total Aset Lancar	32.947.871.930	40.277.548.078
ASET TIDAK LANCAR		
Aset tetap - dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 3.489.251.707 pada tanggal 31 Desember 2020 dan Rp 2.275.120.649 pada tanggal 31 Desember 2019	492.889.499.289	495.008.096.641
Tagihan pajak penghasilan	10.465.848.612	848.335.488
Total Aset Tidak Lancar	503.355.347.901	495.856.432.129
TOTAL ASET	536.303.219.831	536.133.980.207
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang bank jangka pendek	35.936.043.922	25.000.000.000
Liabilitas anjak piutang	-	17.000.000.000
Utang usaha	11.914.283.856	1.319.125.717
Utang lain-lain	2.116.780.349	982.485.294
Beban akrual	5.219.289.444	2.120.851.613
Uang muka diterima	103.000.000	825.459.091
Utang pajak	299.745.596	310.971.497
Pendapatan sewa langgahan	111.132.470	1.123.656.994
Bagian jangka pendek dari liabilitas jangka panjang:		
Utang bank jangka panjang	9.664.291.243	13.369.262.135
Liabilitas sewa	85.401.329.156	103.696.104.066
Total Liabilitas Jangka Pendek	150.765.896.036	165.747.918.407
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek:		
Utang bank jangka panjang	37.915.627.838	37.552.972.480
Liabilitas sewa	115.127.352.331	106.958.600.113
Liabilitas imbalan kerja	2.055.062.684	1.292.385.876
Liabilitas pajak langgahan - neto	5.973.527.318	6.089.372.332
Total Liabilitas Jangka Panjang	161.071.570.171	151.893.330.801
TOTAL LIABILITAS	311.837.466.207	317.641.249.208
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham		
Modal dasar - 4.600.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.550.000.000 saham	155.000.000.000	155.000.000.000
Tambahan modal disetor - neto	(1.205.244.135)	(1.205.244.135)
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	50.000.000	-
Belum ditentukan penggunaannya	34.978.332.018	27.706.931.421
Penghasilan komprehensif lain		
Cadangan revaluasi aset tetap - neto setelah pajak	35.642.665.741	36.991.043.713
TOTAL EKUITAS	224.465.753.624	218.492.730.999
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	536.303.219.831	536.133.980.207

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	2020	2019
PENDAPATAN	162.257.365.449	162.596.163.771
BEBAN POKOK PENDAPATAN	103.385.215.198	96.040.749.238
LABA BRUTO	58.872.150.251	66.555.414.533
BEBAN USAHA		
Gaji dan tunjangan	15.083.726.972	12.553.244.238
Umum dan administrasi	6.913.813.637	7.895.162.765
Total Beban Usaha	21.997.540.609	20.448.407.003
LABA USAHA	36.874.609.642	46.107.007.530
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Penghasilan bunga	326.352.319	11.341.622
Labas perdagangan portofolio efek - neto	71.769.600	38.905.581
Beban keuangan	(26.977.274.558)	(34.027.205.287)
Labas (rugi) penjualan aset tetap	(3.472.122.334)	954.979.510
Kerugian revaluasi aset tetap	(538.478.270)	(446.836.406)
Rugi dari klaim asuransi	(223.976.667)	(191.557.896)
Lain-lain - neto	186.537.251	13.706.737
Total Beban Lain-lain - Neto	(30.627.192.659)	(33.646.666.139)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	6.247.416.953	12.460.341.391
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(3.131.138.198)	(4.352.085.703)
LABA NETO TAHUN BERJALAN	3.116.278.755	8.108.255.688
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:		
Surplus revaluasi aset tetap	2.023.985.564	5.115.631.954
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(146.466.006)	(77.487.299)
Surplus revaluasi aset tetap	116.392.501	(490.282.946)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	41.531.846	19.371.825
Total Penghasilan Komprehensif Lain	2.035.443.905	4.567.233.534
TOTAL LABA KOMPREHENSIF	5.151.722.660	12.675.489.222
LABA NETO PER SAHAM DASAR	2,01	5,23

LAPORAN ARUS KAS		
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	163.931.722.688	159.496.860.484
Penerimaan kas dari klaim asuransi	1.225.002.500	1.730.837.875
Penerimaan bunga	326.352.319	11.341.622
Pembayaran kas untuk beban operasional	(66.187.136.208)	(86.292.016.581)
Pembayaran untuk karyawan	(14.467.516.170)	(12.031.763.191)
Penerimaan dari (pembayaran untuk) pajak	(6.757.566.810)	4.806.977.421
Pembayaran kas untuk aktivitas operasi lainnya	(6.850.851.364)	(18.660.503.900)
Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	71.220.006.957	49.057.833.730
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penjualan kembali portofolio efek	44.472.306.833	18.288.508.334
Penjualan aset tetap	42.436.426.235	32.884.870.448
Penempatan portofolio efek	(41.950.000.000)	(18.300.000.000)
Perolehan aset tetap	(7.440.058.449)	(16.439.858.388)
Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Investasi	37.518.674.619	16.433.520.394
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penambahan utang bank jangka pendek	11.500.000.000	25.000.000.000
Pembayaran pokok liabilitas sewa	(99.225.558.692)	(126.240.521.006)
Pembayaran liabilitas anjak piutang	(17.000.000.000)	(19.000.000.000)
Pembayaran utang bank jangka pendek	(11.500.000.000)	-
Pembayaran utang bank jangka panjang	(3.342.315.534)	(10.773.066.986)
Penerimaan dari liabilitas anjak piutang	-	35.640.000.000
Penambahan utang bank jangka panjang	-	29.975.258.485
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(119.568.274.226)	(65.398.329.507)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS, KAS DI BANK DAN CERUKAN	(10.829.592.650)	93.024.617
KAS, KAS DI BANK DAN CERUKAN PADA AWAL TAHUN	912.096.011	819.071.394
KAS, KAS DI BANK DAN CERUKAN PADA AKHIR TAHUN	(9.917.496.639)	912.096.011
Kas, kas di bank dan cerukan terdiri dari:		
Kas dan kas di bank	1.018.547.283	912.096.011
Cerukan	(10.936.043.922)	-
Neto	(9.917.496.639)	912.096.011

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS						
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)						
	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor - Neto	Saldo Laba		Penghasilan Komprehensif Lain	
			Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya		
			Cadangan Revaluasi Tetap - Neto Setelah Pajak	Total Ekuitas		
Saldo 1 Januari 2019	155.000.000.000	(1.205.244.135)	-	16.559.453.380	35.736.708.257	206.090.917.502
Labas neto tahun berjalan	-	-	-	16.559.453.380	-	16.559.453.380
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-
Surplus revaluasi aset tetap	-	-	-	-	5.115.631.954	5.115.631.954